



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Jl. Jenderal Sudirman 02, RT.04,
Kelurahan Melayu- Tenggarong



dp2kbbkabkukar@gmail.com



<https://dp2kb.kukarkab.go.id>



Dppkb Kutai Kartanegara



[dppkb_kutai_kartanegara](https://www.instagram.com/dppkb_kutai_kartanegara)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke khadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan karuniaNya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. LkjIP merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan disusunnya Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk menciptakan percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang akan datang. Substansi LkjIP ini adalah untuk menginformasikan Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, sekaligus merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Harapan kami LkjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tenggarong, 31 Januari 2024

Kepala,

Drs. Adinur, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016





DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 ISU STRATEGIS	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	6
1.4 DUKUNGAN SARANA PRASARANA, SDM DAN ANGGARAN	6
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD.....	21
2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	23
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023.....	25
2.4 ALOKASI ANGGARAN.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	32
B. REALISASI ANGGARAN.....	46
BAB IV PENUTUP	40
4.1 KESIMPULAN.....	41
4.2 REKOMENDASI.....	41
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Perubahan 2023	
2. Publikasi Perjanjian Kinerja 2023	
3. Sasaran Kinerja 2023	
4. Pohon Kinerja 2023	

ii





DAFTAR TABEL

Tabel – 1.	Sarana dan Prasarana DPPKB.....	10
Tabel – 2.	Pegawai DPPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	14
Tabel – 3.	Pegawai DPPKB Berdasarkan Golongan.....	14
Tabel – 4.	Jumlah PLKB dan PKB.....	15
Tabel – 5.	Alokasi Anggaran Berdasarkan pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	23
Tabel – 6.	Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk & KB	23
Tabel – 7.	Uraian Strategis Renstra dan Arah Kebijakan.....	23
Tabel – 8.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	25
Tabel – 9.	Target Belanja DPPKB Tahun 2023.....	26
Tabel – 10.	Alokasi Anggaran Per Sasaran.....	26
Tabel – 11.	Alokasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2023.....	27
Tabel – 12.	Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.....	32
Tabel – 13.	Analisis Capaian Target.....	32
Tabel – 14.	Rumusan Indikator Sasaran I.....	33
Tabel – 15.	Capaian dan Persentase Sasaran I.....	33
Tabel – 16.	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran dalam 5 Tahun terakhir.....	33
Tabel – 17.	Perbandingan Capaian Sasaran terhadap capaian rata-rata.....	34
Tabel – 18.	Dukungan Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Terhadap Sasaran I.....	37
Tabel – 19.	Rumusan Indikator Sasaran II.....	39
Tabel – 20.	Capaian dan Persentase Sasaran II.....	41
Tabel – 22.	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran dalam 5 Tahun terakhir.....	42
Tabel – 23.	Rumusan Indikator Sasaran III.....	43
Tabel – 24.	Capaian dan Persentase Sasaran III	43
Tabel – 25.	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Dalam 5 Tahun Terakhir.....	45
Tabel – 26.	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran III.....	45
Tabel – 27.	Rumusan Indikator Sasaran IV.....	45
Tabel – 28.	Capaian dan Prosentasi Sasaran IV.....	45
Tabel – 29.	Perbandingan Capaian Indikator, Sasaran dalam 5 Tahun Terakhir.....	45
Tabel – 30.	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran IV.....	46
Tabel – 31.	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DPPKB Tahun 2023.....	48
Tabel – 32.	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPPKB Tahun 2023.....	49
Tabel – 33.	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023.....	51
Tabel – 34.	Form Pengukuran Kinerja Sasaran I.....	52
Tabel – 35.	Tabel Jumlah PLKB dan PKB.....	54

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik – 1.	Persentase Keluarga Berencana Aktif Per Pasangan Usia Subur (PUS) 30
Grafik – 2.	Jumlah Peserta KB Aktif Di Setiap Kecamatan 31
Grafik – 3.	Komposisi Jenis Kontrasepsi Yang Digunakan Akseptor KB 32





DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar – 1. “TOKO KENCANA” (TEMPAT OBROLAN DAN KOMUNIKASI KELUARGA BERENCANA.....	28
Gambar – 2. Pelayanan KB Dalam Rangka Meningkatkan Angka Kesertaan Ber-KB	29
Gambar – 3. Pelayanan KB Gratis Bagi Keluarga Miskin	33
Gambar – 4. Petugas KB Saat Memberikan Pelayanan KB Gratis	32
Gambar – 5. Pencanangan Kampung KB Percontohan “ Bina Sejahtera “	32





BAB I

PENDAHULUAN

4.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) beserta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera – Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun berikutnya.

4.2 ISSUE STRATEGIS

Beberapa Issue strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :





1. Pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi
2. Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga yang berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan dan menjalankan 8 Fungsi Keluarga.
4. Belum optimalnya peran aktif kader kelompok UPPKA dalam mendukung kesejahteraan keluarga karena terbatasnya kapasitas dan ketrampilan dalam berwirausaha;
5. Belum optimalnya peran aktif kader Tribina Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia (BKB, BKR dan BKL) untuk mendukung ketahanan keluarga
6. Masih rendahnya kesertaan KB dengan metode MKJP;
7. Masih belum optimalnya pendataan terkait Keluarga Berencana secara berjenjang dan tervalidasi.
8. Masih terdapat persepsi yang kurang tepat mengenai stunting

4.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya di jabarkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut :

4.3.1 KEDUDUKAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekeretaris Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala, yang didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan Tiga Kepala Bidang.

4.3.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



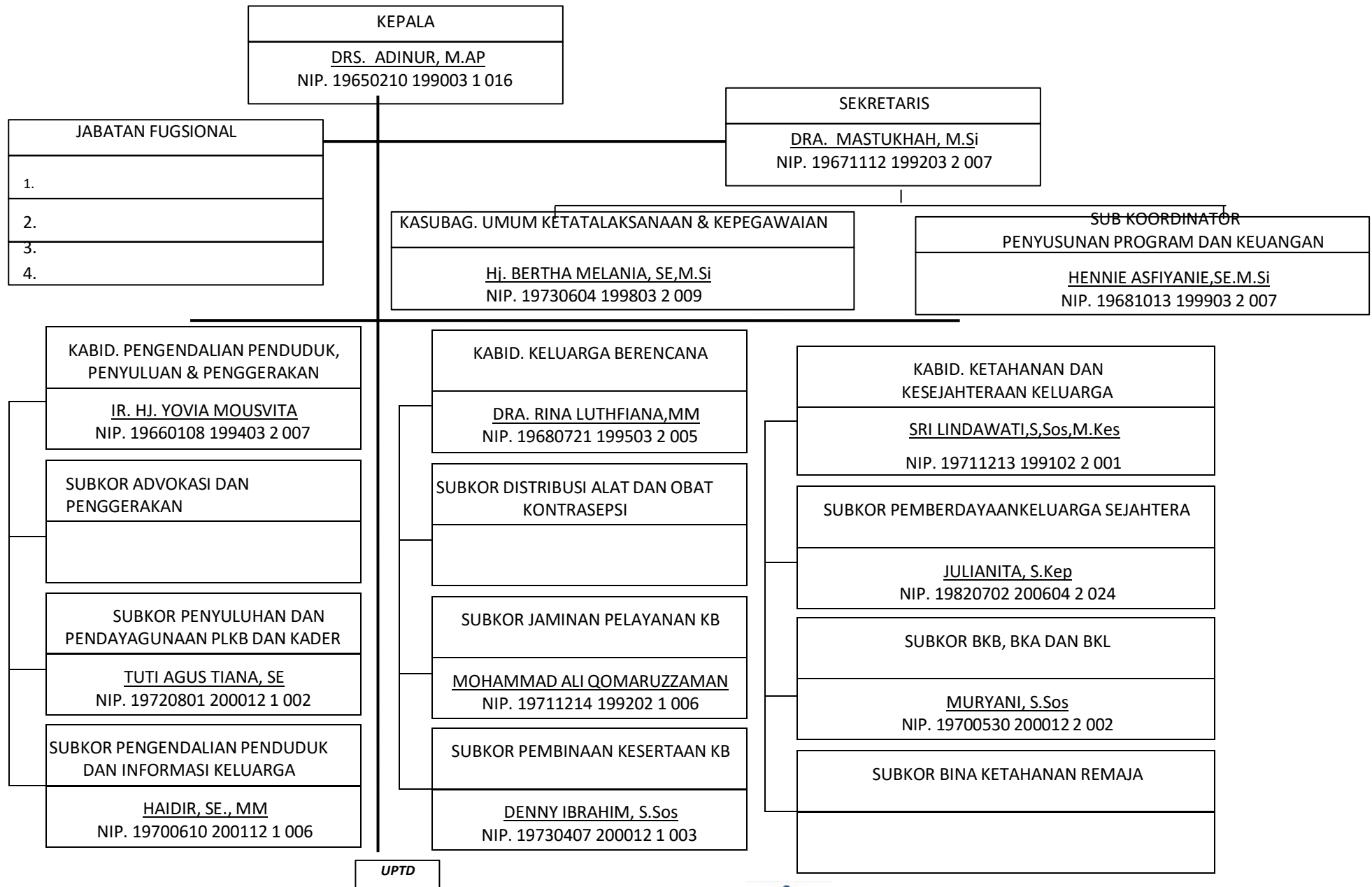


- Fungsi** : Dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 2. Pelaksanaan kebijakan dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.





1. STRUKTUR ORGANIASI



Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dibantu oleh Sekretaris dan Tiga (3) orang Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Kepala Bidang Keluarga Berencana serta Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sementara untuk tugas lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala DPPKB serta dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - b. Sub Koordinator Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala DPPKB serta dibantu oleh :
 - a. Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan
 - b. Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - c. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
3. Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala DPPKB serta dibantu oleh :
 - a. Sub Koordinator Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
 - b. Sub Koordinator Jaminan Pelayanan KB
 - c. Sub Koordinator Pembinaan dan Kesertaan KB
4. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala DPPKB serta dibantu oleh :
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - b. Sub Koordinator Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia
 - c. Sub Koordinator Bina Ketahanan Remaja
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas selain membantu Kepala DPPKB mereka juga bertugas berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.4 DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA, SDM DAN ANGGARAN

Sarana dan prasarana penunjang Pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 1
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun
2023 Daftar Sarana dan Prasarana Kantor DP2KB
INVENTARIS EKSTRA KOMPATABEL

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	767
	ALAT BESAR	3
	- Portable Generating Set	1
	- Transportable Water Pump	2
	KOMPUTER	213
	- P.C Unit	43
	- Lap Top	40
	- Note Book	32
	- Hard Disk	9
	- Monitor	1
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	87
	- Server	1
	ALAT ANGKUTAN	134
	- Station Wagon	1
	- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2

- kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1
- Sepeda Motor	128
- Mobil Unit Penerangan Darat	1
- kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1
- Gergaji	1
ALAT PERTANIAN	2
- Lemari Penyimpan	2
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	254
- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2
- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	5
- Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	2
- Lemari Kayu	11
- Rak Besi	10
- Rak Kayu	14
- Filing Cabinet Besi	7
- Brandkas	1
- CCTV - Camera Control Television System	1
- White Board	11
- Alat Penghancur Kertas	8
- LCD Projector/Infocus	2
- Papan Pengumuman	1
- Meja Rapat	12
- Meja 1/2 Biro	2
- Meja Komputer	6
- Lemari Es	3
- A.C. Window	5
- A.C. Split	30
- Kipas Angin	5
- Exhaust Fan	5
- Televisi	9
- Amplifier	13
- Sound System	1
- Wireless	3
- Water Filter	1
- Tangga Aluminium	2
- Dispenser	8
- Handy Cam	2
- Karpet	1
- Gordyin/Kray	1
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10
- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	55
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	96
- Microphone/Wireless MIC	1
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	7
- peralatan studio audio lainnya (dst)	1
- Camera Electronic	1
- Digital Video Effect	2
- Film Projector	1
- Slide Projector	3
- Layar Film/Projector	8
- Alat Studio Video Lainnya	1
- Telephone Mobile	67
- Slide Projector (Lapangan)	4
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	61
- Sterilisator	11
- Tensimeter	3
- Alat Kedokteran umum lainnya	9

	- alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	38
	ALAT LABORATORIUM	3
	- alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	2
	- alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	1
TOTAL		767

Daftar Sarana dan Prasarana Kantor DP2KB

Gedung dan Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS(M2)
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BANGUNAN GEDUNG		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. JEND. SUDIRMAN NO. 75 KEC. TENGGARONG	1.539,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Desa Sebulu Moderen Kecamatan Sebulu	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Mulawarman RT. 01, Desa Sungai Meriam, Kec. Anggana	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Udang Kelurahan Timbau Tenggarong	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kec. Marang Kayu	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa	
	- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	-	50,00
	- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Desa Bhuana Jaya Kec Tenggarong	50,00
	- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Seberang	
	- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan	50,00
	- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kecamatan Kota Bangun	50,00
	- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Komplek Perkantoran kantor Camat Loa Janan	50,00
	- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Desa Sumbersari Kecamatan Loa Kulu	50,00
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kecamatan Kembang Janggut	50,00
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kecamatan Muara Badak	50,00
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	-	
	- Pagar Permanen	Dunas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jl. Jenderal Sudirman No 2 RT 4 Kelurahan Melayu Tenggarong	21,18
	- Pagar Permanen		
TOTAL			



Daftar Sarana dan Prasarana Kantor DP2KB

Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA JARINGAN - Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas kecil - Jaringan Sambungan Ke Kuman Kapasitas kecil - Jaringan Sambungan Ke Kuman Kapasitas kecil - Jaringan Sambungan Ke Kuman Kapasitas kecil - Jaringan Sambungan Ke Kuman Kapasitas kecil - Jaringan Sambungan Ke Kuman Kapasitas kecil - Jaringan Sambungan Ke Kuman Kapasitas sedang - Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA - Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA - Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA - Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA - Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA - Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA - Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Desa Bhuana Jaya Kecamatan Menggarong Seberang Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan Kecamatan Sebulu Komplek Kantor Camat Kota Bangun Komplek Kantor Camat Sambaja Ji Samarinda Balikpapan Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut - Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut Jl. Gas Alam Desa Batu Batu Kec. Muara Badak - Desa Bhuana Jaya Kecamatan Menggarong Seberang Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan Komplek Kantor Camat Sambaja	0,00
TOTAL			





Daftar Aset Tanah

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TANAH - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	jalan jendral sudirman no 75 kel melayu kec tenggarong	1.625,00
TOTAL			

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DPPKB

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 116 orang, meliputi 52 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 38 orang P3K, 10 orang PNS Petugas Lapangan(PKB), 5 orang Non PNS penyuluh lapangan dan 11 orang THL Kantor, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jenjang pendidikan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai berikut : SLTA sebanyak 33 orang, Diploma III sebanyak 2 orang, Strata 1 sebanyak 66 dan Strata 2 sebanyak 13 Orang.

Tabel- 2

Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
SLTA	3	10	8
DIPLOMA III	-	2	2
STRATA 1	45	42	76
STRATA 2	14	-	14
Jumlah	62	54	116

Tabel -3

Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Berdasarkan Golongan Tahun 2023

Per Golongan	PNS	Non PNS	Jumlah
Golongan 1	-	34	34
Golongan II	11	-	13
Golongan III	31	-	-
Golongan IV	10	-	-
Jumlah	52	34	47





Tabel-4
Jumlah PLKB dan PKB

Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
PLKB	-	43	43
PKB	10	-	10
Jumlah	10	43	53

DUKUNGAN ANGGARAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun Anggaran 2023 memiliki Anggaran sebesar Rp. 32.030.197.289,00 dan yang digunakan untuk 4 (Empat) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
4. Program Keluarga Berencana (KB)

Tabel – 5
Alokasi Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN-TASE
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.635.647.219,00	55,06
1a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	504.999.999,00	0,88
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	255.000.000,00	0,80
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,00	0,16
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/DPA	19.999.999,00	0,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	0,09
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	0,47
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.393.512.084,00	23,53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.103.512.084,00	22,27
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	0,05
	Koordinasi dan penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	0,10
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	250.000.000,00	1,08
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	0,03
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	328.450.000,00	0,33
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	288.450.000,00	0,23
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000,00	0,19
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	532.631.091,00	1,67
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	352.410.000,00	1,10





NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN- TASE
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.221.091,00	0,56
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	648.794.250,00	1,42
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	218.291.450,00	0,42
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000,00	0,17
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.699.800,00	0,06
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	267.350.000,00	0,65
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.453.000,00	0,13
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.891.855.909,00	1,20
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.659.320.000,00	8,30
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	304.123.000,00	0,23
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900.000.000,00	0,62
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.028.412.909,00	0,35
g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.595.032.308,00	5,49
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	0,49
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	0,17
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.345.032.308,00	4,85
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.371.578,00	0,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.860.000,00	0,14
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.511.578,00	0,32
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	337.000.000,00	0,42
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	337.000.000,00	4,64
2a.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	840.209.500	0,86
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	529.010.000,00	0,4
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	50.000.000,00	0,17
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,17
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	211.199.500,00	0,17
b.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	644.399.920,00	51,71





NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN- TASE
	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	150.000.000,00	0,17
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	74.999.920,00	0,37
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	0,20
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	75.000.000,00	0,23
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	190.200.000,00	0,59
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	90.000.000,00	0,4
3.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.570.152.000	20,51
3a.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.083.768.000	3,38
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	95.953.000	0,3
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.015.000	0,31
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	267.192.000	0,83
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	567.000.000	1,77
	Pengendalian Program KKBPK	53.608.000	0,17
b.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	847.000.000	2,64
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	300.000.000,00	0,94
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	73.000.000,00	0,23
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	474.000.000	1,48
c.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.614.822.000	8,16
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.000.000	0,11
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	959.678.000	3
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	434.032.000	1,34
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	1.035.112.000	3,23





NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN- TASE
	termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	190.000.000	0,6
d.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	718.000.000	2,24
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	45.000.000	0,14
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	84.000.000	0,26
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	589.000.000	0,84
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.339.788.650	19,79
4a.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.656.240.000	14,54
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.279.400.000	4
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	680.190.000	2,12
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.135.000.000	9,79
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	250.000.000	0,78
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.000.000	0,23
	Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan Keuangan Keluarga)	75.000.000	0,23
b.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	450.000.000	1,41
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan	745.198.650	2,33





NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN- TASE
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000	0,17
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	50.000.000	0,17

4.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LkjIP Dinas Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan,

Pada Bab ini disajikan latar belakang, struktur Organisasi dan tata kerja organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategis issued), landasann hukum dan sistematika penulisan LkjIP.

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekretaris, Kepala Bidang/Administrator, JFT, dan Kepala Sub Bag/Pengawas.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1). Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2). Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 4). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5). Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 6). Uraian realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk





mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja,

Bab IV – Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Dalam gambaran umum Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 secara umum merupakan alat pengambil keputusan dan sebagai langkah kongkrit yang akan ditempuh di waktu yang akan datang untuk mencapai sasaran ataupun tujuan yang di inginkan dengan memperhitungkan kondisi potensi, peluang dan kendala yang kemungkinan di hadapi, sehingga dapat di gunakan sebagai tolak ukur atas pelaksanaan suatu kegiatan dan mempermudah dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan.

Dalam rangka pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini di jadikan sebagai instrumen pertanggung jawaban, perencanaan ini merupakan pengintergrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis local, regional, nasional dan global serta berada dalam tatanan system dan kaidah manajemen nasional.

Maksud dan Tujuan dari rencana strategis untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga rencana strategis ini dapat memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit – unit organisasi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, selain itu rencana strategis dapat mempermudah pengendalian, koordinasi, monitoring, analisis, evaluasi baik secara internal maupun eksternal.

2.1.1. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Instrumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
2. Tersusunnya sebuah dokumen yang akan menjadi panduan serta digunakan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Terciptanya pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi ke masa depan.
4. Terwujudnya komunikasi baik vertikal maupun horizontal antara unit kerja dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal serta proses pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan organisasi.





2.1.2. VISI DAN MISI

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai organisasi unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana perlu secara terus menerus mengembangkan peluang, melakukan inovasi dan versifikasi agar dapat mengikuti perkembangan kemajuan zaman.

Meningkatnya persaingan, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan itu harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Adapun Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga merupakan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Perangkat Daerah yang bertugas dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan mengetahui kebijakan dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Guna mewujudkan visi DPPKB 2016 – 2021 maka disusunlah misi yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan tugas ke pemerintahannya oleh sebab itu misi DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut :

1. Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk rakyat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

2.1.3. SASARAN DAN INDIKATOR

Dalam rangka menjabarkan dan sekaligus mengimplementasikan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak terlepas dari sasaran strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Keluarga Berencana, maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator kinerja DPPKB





Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Tabel – 6.
Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja
Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Menurunnya Angka kelahiran Total(TFR) per WUS(15-49 tahun)	2,18
2.	Meningkatkan peran stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	Meningkatnyaperan stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	35
3.	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan keluarga	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	58,50
4.	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	85,40

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang strategi yang di lakukan DPPKB merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam system akuntabilitas kinerja pemerintah. Strategi merupakan langkah awal untuk melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penyusunan rencana kerja yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan perencanaan strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan yang mengintegrasikan segenap aktivitas pelaksanaan kegiatan DPPKB dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategik regional, nasional dan global dalam tatanan system manajemen nasional.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan arah kebijakan adalah sebagai berikut : strategik

Tabel – 7.
Uraian Strategi RENSTRA dan Arah Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Mewujudkan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan





NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	tumbuh seimbang,berkualitas dan daya saing	Subur(PUS)		edukasi BANGGA KENCANA Peningkatan kualitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesertaan keluarga berencana	Peningkatan Kualitas Basis Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Peningkatan kualitas basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) BANGGA KENCANA
3.	Meningkatkan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya aksesibilitas keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 dalam program keluarga berencana	Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas
4.	Mengoptimalkan pengendalian Penduduk	Optimalnya Pengendalian Penduduk	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga Peningkatan pembangunan keluarga

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPPKB untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan sarana prasarana perkantoran sesuai dengan standar.
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan.
5. Peningkatan kualitas basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
6. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
7. Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK.
8. Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga.
9. Peningkatan pembangunan keluarga.

Adapun program kerja operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja. Program-program tersebut telah ditetapkan di RPJMD yang nantinya DPPKB hanya mengikuti arah pada program-program yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka program operasional yang akan dilaksanakan oleh DPPKB meliputi :





1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program kerja operasional diatas kemudian dijabarkan kembali menjadi kegiatan organisasi yang disusun dengan dimensi tahunan. Program tersebut merupakan yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi DPPKB Kaupaten Kutai Kartanegara, namun demikian masih dimungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai penunjang, yaitu kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara rutin/ berkala tanpa harus dimasukkan didalam dokumen RENSTRA, kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadibahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja yang berdimensi lima (5) tahunan.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian kinerja Kepala DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel-8
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	Persen	2,18
2.	Meningkatnyaperan stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	Persen	35
3.	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	Nilai	58,50
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	Nilai	85,40





2.4. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023

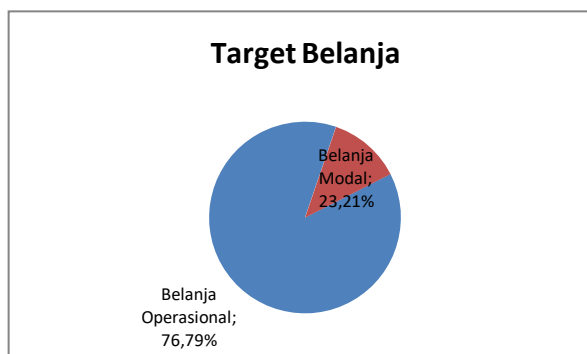
Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 32.030.197.289,00 yang bersumber dari APBD.

1.7.1.Target Belanja

Jumlah anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp 32.030.197.289,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel - 9
Target Belanja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	JENIS	ANGGARAN	Persentase
1.	Belanja Operasi	24.597.562.445,00	76,79
2.	Belanja pegawai	7.789.602.094,00	52,48
3.	Belanja Barang /Jasa	16.807.960.351,00	52,48
4.	Belanja Modal	7.432.634.844,00	23,21
5.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.327.474.844,00	19,76
6.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.105.160.000,00	3,45
7.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0
	Jumlah	(32.030.197.289,00)	



1.7.2. Alokasi Anggaran per Sasaran

Anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel – 10
Alokasi Anggaran per Sasaran

NO.	SASARAN	ANGGARAN	PERSENTASE
1.	Meningkatnya Kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	6.570.152.000	20,51
2.	Meningkatnya peran stakeholder dalam program kependudukan	1.484.609.420	4,64





NO.	SASARAN	ANGGARAN	PERSENTASE
3.	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	6.339.788.650	19,79
4.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	17.636.647.219	55,06

1.7.3. Alokasi Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

DPPKB Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023 merencanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 65 (Enam Puluh Lima) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel – 11

Alokasi Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN-TASE
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.636.647.219	55,06
1a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	281.648.000	2,59
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	255.000.000	49,16
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000	12,74
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/DPA	19.999.999	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	9,04
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	29,10
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.535.762.621	69,36
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.132.835.621	94,65
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	0,19
	Koordinasi dan penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.342.000	0,41
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	346.585.000	4,59
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	0,13
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	104.570.000	0,96
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.570.000	71,31
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	28,68
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.888.000	0,55
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59.888.000	0,1
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.693.618	4,19
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	135.000.000	29,62
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	10,97
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.800	4,38





NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN- TASE
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	209.200.818	45,90
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41.493.000	9,10
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	385.545.900	3,54
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	19,45
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	51,87
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.545.900	28,67
g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.758.983.348	16,19
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.091.040	8,87
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	2,84
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.552.892.308	88,28
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.629.479	2,59
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.830.000	15,91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.775.578	36,49
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.023.901	47,58
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.484.609.420	2,68
2a.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	275.000.000	48,28
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	125.000.000	45,45
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	50.000.000	18,18
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	50.000.000	18,18
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	50.000.000	28,40
b.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	294.501.000	51,71
	Penyediaan dan pengolahan Data Kependudukan	50.000.000	16,97
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	117.301.000	39,83
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	127.200.000	43,19
3.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.570.152.000	22,03
3a.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai	1.083.768.000	23,18





NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN- TASE
	Kearifan Budaya Lokal		
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	95.953.000	8,85
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.015.000	9,22
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	267.192.000	24,65
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	567.000.000	52,31
	Pengendalian Program KKBPK	53.608.000	4,94
b.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	847.000.000	104,94
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	300.000.000,00	0,94
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	73.000.000,00	0,23
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	474.000.000	1,48
c.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.614.822.000	36,60
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.000.000	31,10
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	959.678.000	32,76
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	434.032.000	53,64
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1.035.112.000	0,91
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	150.000.000	11,56
d.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	718.000.000	15,87
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	45.000.000	6,06
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	84.000.000	5,64
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	589.000.000	88,29
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.339.788.650,00	19,79





NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN- TASE
4a.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.494.590.000,00	17,15
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.279.400.000,00	3,99
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	680.190.000,00	2,12
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.135.000.000,00	9,79
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	250.000.000,00	0,78
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.000.000,00	0,23
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keluarga)	75.000.000,00	0,23
b.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	845.198.650,00	3,67
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahana dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	745.198.650,00	2,33
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000,00	0,17
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	50.000.000,00	0,17





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja, melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut

Tabel – 12
Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

No	Rentang Capaian	Kategori
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Baik
3	$66\% \leq 75\%$	Cukup
4	$51\% \leq 66\%$	Kurang
5	$\leq 50\%$	Sangat Kurang

3.1.EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Tabel-13
Analisa Capaian Target

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN 2023			KATEGORI
			TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,18	2,13	102,35	Sangat Baik
2	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	35	7	20,0	Sangat Kurang
3	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek pembangunan Keluarga	58,50	63,34	108,27	Sangat Baik
4	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	85,40	75,60	88,52	Baik





3.2.EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PER SASARAN

Berikut capaian kinerja per sasaran yang dilaksanakan DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 dan selama periode RENSTRA (2021 – 2026) :

3.2.1 Sasaran Strategis ke 1, Meningkatnya Kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

Kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya Angka TFR perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)

Tabel - 14

Rumusan Indikator Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Kesadaran ber-KB Bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)per WUS (15-49 Tahun)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR I (i = 1,2,3 \dots)$

Tabel- 15

Capaian dan Persentase Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya Kesadaran ber-KB Bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)per WUS (15-49 Tahun)	2,18	2,13	102,4
2.	Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR	77,22	66,91	86,65

Pada Indikator Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) telah mencapai angka 2,13 dari target pada Renstra 2,18 %. Yang berarti terjadi penurunan angka kelahiran sebesar 0,05 % dengan capaian 102,4 % (Sangat Baik). Pada indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR telah terealisasi sebesar 66,91 % dari taget 77,22% dengan capaian 86,65% termasuk katagori Baik.



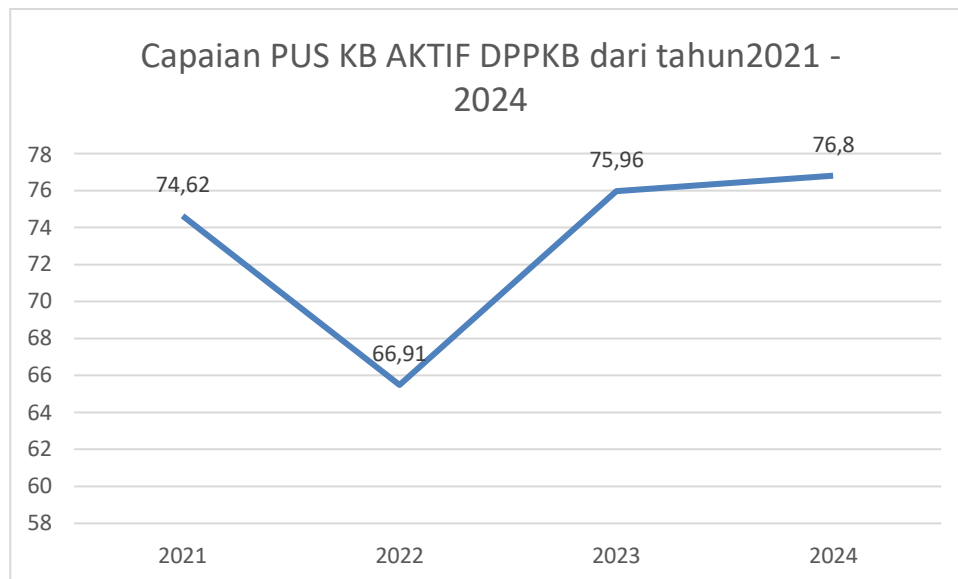


Tabel- 16
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran dalam 4 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian			Target		
	2021	2022	2023	2024	2025	%
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)per WUS (15-49 Tahun)	2,53	2,39	2,13	2,16	2,14	
Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana			66,91			

Beberapa realisasi indikator kinerja sudah menunjukkan progres positif terhadap capaian target kinerja RPJMD Tahun 2023. Namun dari target Kesertaan ber-KB sebesar 77,22% hanya tercapai 66,91% dikarenakan masih tingginya Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani /unmet need (12,80%), rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat ber-KB, serta masih rendahnya ratio pelayanan PLKB terhadap PUS.





Berdasarkan Wilayah dari jumlah 103.709 Keluarga Sasaran yang termasuk Kategori Keluarga Beresiko Stunting terbesar adalah Kecamatan Muara Badak sebesar 2.793 dan terendah Kecamatan Kota Bangun Darat sebanyak 606 Keluarga Beresiko Stunting.

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia sampai saat ini masih cukup tinggi, pada kisaran 189 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi mencapai 16,85 per 1000 kelahiran hidup. Sementara target 183 (per 100.000 kelahiran hidup) harus dicapai pada di tahun 2024. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kematian ibu adalah melalui program Keluarga Berencana (KB), yang bertujuan untuk merencanakan kehamilan dan mengendalikan kelahiran sehingga terwujud keluarga berkualitas. Bahwa kehamilan harus dengan perencanaan dan persiapan yang matang, kesehatan ibu sangat menentukan kondisi tumbuh kembang janin dalam rahim. Sehingga bayi lahir sehat, terhindar dari risiko stunting.

Meningkatnya kesertaan PUS ber-KB atau meningkatnya peserta KB baru menjadi sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Target realisasi indikator tercapai pada tahun 2023 sebesar 66,91%, terdapat peningkatan sebesar 2,21 % dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 Sebesar 64,70%.

Beberapa hal menjadi penyebab kurang maksimalnya capaian indikator ini antara lain : keterlambatan tenaga PKB/PLKB dalam melakukan input data sasaran pelayanan KB dalam aplikasi SIGA, karena perbaikan dan pengembangan aplikasi SIGA sendiri yang dalam proses input data akseptor berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sedangkan sebelumnya





input sasaran hanya dengan nama. Keterlambatan sosialisasi pada petugas pelaksana pelayanan KB di Fasyankes KB, sehingga pada saat melakukan skrining awal tidak mencantumkan NIK. Akseptor. Sementara laporan dan data pelayanan KB yang sudah terkumpul tidak ditolak oleh aplikasi karena tidak ada NIK, pada proses input secara online dan realtime. Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan capaian kesertaan PUS dalam program KB, dan sebagai rekomendasi tindak lanjut hasil analisis permasalahan tersebut, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang pembiayaan pelayanan KB MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) jenis MOW/MOP dengan 3 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yaitu : RSUD AM. Parikesit Tenggarong, RSUD ABADI Samboja dan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, bahwa semua pembiayaan (jasa medis, Alkon, BMHP, transport kader pengantar, serta akomodasi akseptor) ditanggung oleh BOKB.
2. Membuat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Sosial tentang fasilitasi pengurusan kepesertaan dalam Jaminan Sosial (BPJS) bagi calon akseptor KB metode MOW dan MOP dari keluarga pra sejahtera
3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan petugas pelaksana pelayanan KB (bidan dan dokter) untuk mencantumkan NIK akseptor pada saat skrining awal
4. Menegaskan pada PKB dan PLKB bahwa salah satu tupoksi PKB dan PLKB adalah segera melakukan input data pelayanan KB secara realtime
5. Usulan peningkatkan kapasitas tenaga pelayanan KB (bidan dan dokter) fasilitas pelayanan KB (Puskesmas dan klinik) dengan Pelatihan CTU
6. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB di Faskes KB, antara lain : Laparoscopy, Vasektomi tanpa pisau (VTP), alat dan obat kontrasepsi, BMHP, IUD Kit, Implan removal Kit baik dari APBD, APBDP maupun BOKB
7. Optimalisasi kegiatan pelayanan KB bergerak penjangkaran sasaran pelayanan KB awal tahun dan pada event-event tingkat Nasional maupun Kabupaten, seperti : HARGANAS, HKG, Hari Ketahanan Pangan, HUT IBI, HUT TNI POLRI, Pelayanan KB Sejuta Akseptor (PSA) dll

Kegiatan pelayanan baik adminitrasi maupun teknis sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berencana dilaksanakan dengan menerapkan standard keamanan / mengikuti protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan agar pelayanan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta dapat meningkatkan pelayanan yang tertib administrasi dan pelayanan yang berkualitas.

Pada tahun 2023 seluruh pekerjaan yang berkontrak sudah dibayarkan 100 % sehingga tidak terdapat beban hutang kepada pihak ketiga.





Dalam rangka pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan terkait penurunan kasus stunting, telah dilakukan Audit Kinerja oleh BPK RI dan BPKP yang merekomendasikan agar diberi tagging yang jelas pada kegiatan yang terkait stunting.

3.3 INOVASI

Dengan berjalannya waktu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjawab tantangan dan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik yang masih terjadi sampai saat ini dengan menghadirkan inovasi yaitu “TOKO KENCANA”.

TOKO KENCANA merupakan singkatan dari TEMPAT OBROLAN DAN KONSULTASI KELUARGA BERENCANA. Hal ini merupakan suatu upaya meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dengan menyediakan akses komunikasi, informasi dan melalui multi media baik secara offline maupun online agar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya terkait dengan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).







Untuk mendukung sasaran ini, DPPKB ditopang oleh 1 (satu) program, kegiatan, dan subkegiatan, yaitu:

Tabel 18
Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran I

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		PERSEN TASE
		ALOKASI	REALISASI	
1.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.570.152.000,00	3.898.072.589,00	59,33
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.390.330.000,00	905.633.666,00	37,89
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1.314.580.000,00	268.644.000,00	20,44
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	50.000.000,00	21.034.000,00	42,07
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Mitra Kerja	225.000.000,00	137.663.750,00	61,18
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	75.000.000,00	25.590.000,00	34,12
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	247.500.000,00	164.510.000,00	66,47
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	398.250.000,00	225.666.916,00	56,25
	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	62.525.000,00	78,16
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	847.000.000,00	518.159.800,00	61,18
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	474.000.000,00	416.362.600,00	87,84
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	300.000.000,00	46.400.000,00	15,47
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,	73.000.000,00	55.397.200,00	75,89





	Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.614.822.000,00	1.903.147.123,00	72,78
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.000.000,00	17.472.000,00	48,53
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	959.678.000,00	828.674.110,00	86,35
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	434.032.000,00	375.336.000,00	86,48
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	1.035.112.000,00	539.744.013,00	52,14
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	150.000.000,00	141.921.000,00	94,61
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	718.000.000,00	571.132.000,00	79,54
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	45.000.000,00	15.187.000,00	33,75
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	84.000.000,00	53.345.000,00	63,51
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	589.000.000,00	502.600.000,00	85,33

Upaya dilakukan DPPKB untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, diantaranya yaitu:

1. Mereview dan merevisi Rencana Strategis DPPKB dalam hal perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat dan Bappeda
2. Merumuskan *cascading* kinerja dengan menggambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran.
3. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (*core business*) atau sasaran strategisnya.
4. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara terus menerus sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan baik efisiensi maupun efektivitasnya.

Walaupun capaian kinerja indikator sasaran ini dengan Kategori Sangat Baik, namun masih ada beberapa kendala/hambatan, diantaranya:

1. Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal.
2. Banyaknya perubahan regulasi terkait OPD
3. Terbatasnya SDM dan tingginya beban kerja sehingga berpengaruh terhadap pelayanan





3.2.2. Sasaran Strategis ke 2, Meningkatnya Peran Stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA

Tabel- 19
Rumusan Indikator Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program BANGGA KECANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Tabel- 20
Capaian dan Persentase Sasaran

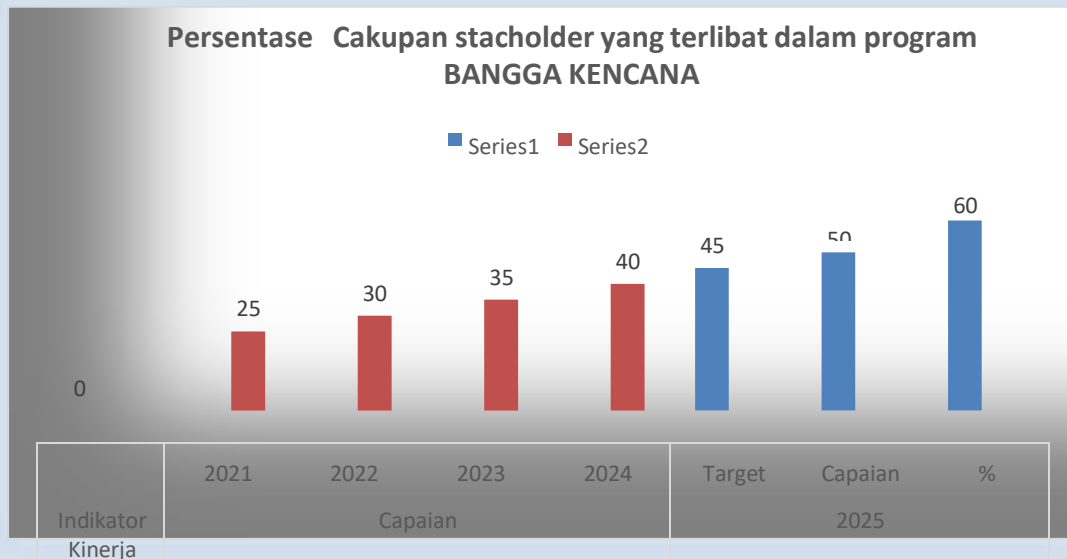
No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	35	7	20,0%

Tabel- 21
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran dalam 5 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian			Target		
	2021	2022	2023	2024	2025	%
Persentase Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	25	30	7	40	45	

Terjadi penurunan Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama Cakupan Stakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA dari tahun sebelumnya sebanyak 30% menjadi 20%. Hal ini disebabkan penetapan target capaian di Renstra 2021-2026 sudah tinggi, padahal idealnya berdasarkan target dari BKKBN Propinsi Kaltim hanya berkisar 20%. Pada Renstra, target capaian dari Cakupan Stakeholder Yang Terlibat Dalam Program Bangga Kencana adalah menghasilkan 35 Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang terealisasi hanya 7 Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau 20% dari target.





Tabel- 22

Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran II

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		PERSEN TASE
		ALOKASI	REALISASI	
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.484.609.420,00	1.074.028.066,00	72,34
	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	840.209.500,00	604.959.236,00	72,00
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	529.010.000,00	475.833.676,00	89,95
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	50.000.000,00	37.220.000,00	74,44
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.120.000,00	96,24
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	211.199.500,00	43.785.560,00	20,73
	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	644.399.920,00	469.068.830,00	72,79
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	150.000.000,00	118.979.000,00	79,32
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	74.999.920,00	48.850.830,00	65,13
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	3.270.000,00	5,09
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	75.000.000,00	68.805.000,00	91,74
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	190.200.000,00	139.200.000,00	73,19





Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	90.000.000,00	89.964.000,00	99,56
--	---------------	---------------	-------

Upaya dilakukan DPPKB untuk mendukung keberhasilan sasaran ini, diantaranya yaitu:

1. Mereview dan merevisi Rencana Strategis DPPKB dalam hal perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi dari Invektorat dan Bappeda
2. Merumuskan cascading kinerja dengan menggambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran.
3. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (core business) atau sasaran strategisnya.
4. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara terus menerus sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan baik efisiensi maupun efektivitasnya.
5. Mengikuti Bimbingan Teknis terkait SAKIP dari PPKK Fisipol UGM yang diadakan di Samarinda

Walaupun capaian kinerja indikator sasaran ini dengan Kategori Sangat Baik, namun masih ada beberapa kendala/hambatan, diantaranya:

1. Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal.
2. Banyaknya perubahan regulasi terkait OPD.
3. Terbatasnya SDM dan tingginya beban kerja sehingga berpengaruh terhadap pelayanan

3.2.3. Sasaran 3, Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga

Tabel- 23

Rumusan Indikator Sasaran 3

Dimensi Ketentraman + Dimensi Kemandirian + Dimensi Kebahagiaan

$$\begin{aligned}
 I - \text{BANGGA} &= \frac{\text{Dimensi Ketentraman} + \text{Dimensi Kemandirian} + \text{Dimensi Kebahagiaan}}{3} \\
 &= \frac{62,42 + 57,35 + 70,26}{3} \\
 &= 63,34
 \end{aligned}$$

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Tabel- 24

Capaian dan Persentase Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kualitas Kesejahteraan Keluarga	58,50	63,34	108,27

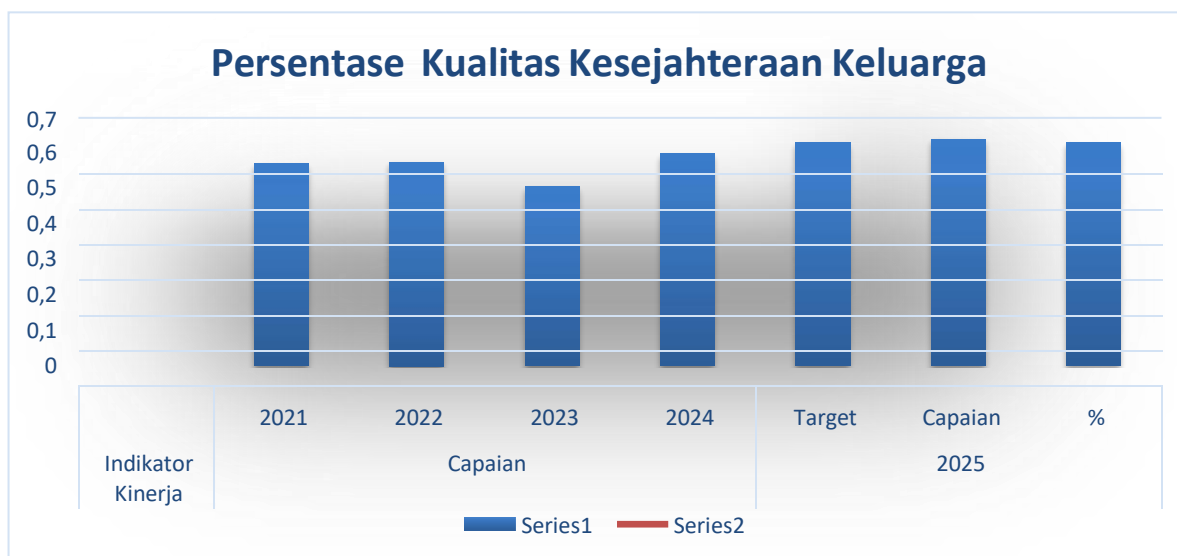
Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mencapai 108,27% . Pada Indikator Sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu Indeks Pembangunan Keluarga pada tahun 2023 sebesar 63,34 dari target 58,50 dengan capaian 108,27% termasuk katagori sangat baik. Namun perlu untuk menggalang Program Prioritas Bimbingan Pranikah guna mempersiapkan keluarga yang tangguh sehingga nantinya mampu melahirkan generasi yang berkualitas.





Tabel - 25
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran dalam 5 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian			Target		
	2021	2022	2023	2024	2025	%
Persentase Kualitas Kesejahteraan Keluarga	57	57,50	63,34	60	63	



Tabel- 26
Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran III

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		PERSEN TASE
		ALOKASI	REALISASI	
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.339.788.650,00	5.705.598.633,00	90,00
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.494.590.000,00	5.101.398.037,00	92,84
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.279.400.000,00	1.140.042.305,00	89,11
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	680.190.000,00	508.304.287,00	74,73
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.135.000.000,00	3.092.284.499,00	98,64
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	250.000.000,00	235.143.000,00	94,06





	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.000.000,00	52.245.000,00	69,66
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keluarga)	75.000.000,00	73.378.946,00	97,84
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	845.198.650,00	604.201.095,00	71,49
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	745.198.650,00	516.699.640,00	69,34
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000,00	39.590.000,00	79,18
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	50.000.000,00	47.911.455,00	95,82

3.2.4. Sasaran 4, Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel - 27

Rumusan Indikator Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$

Table- 28

Capaian dan Persentase Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	85,40	75,60	88,84

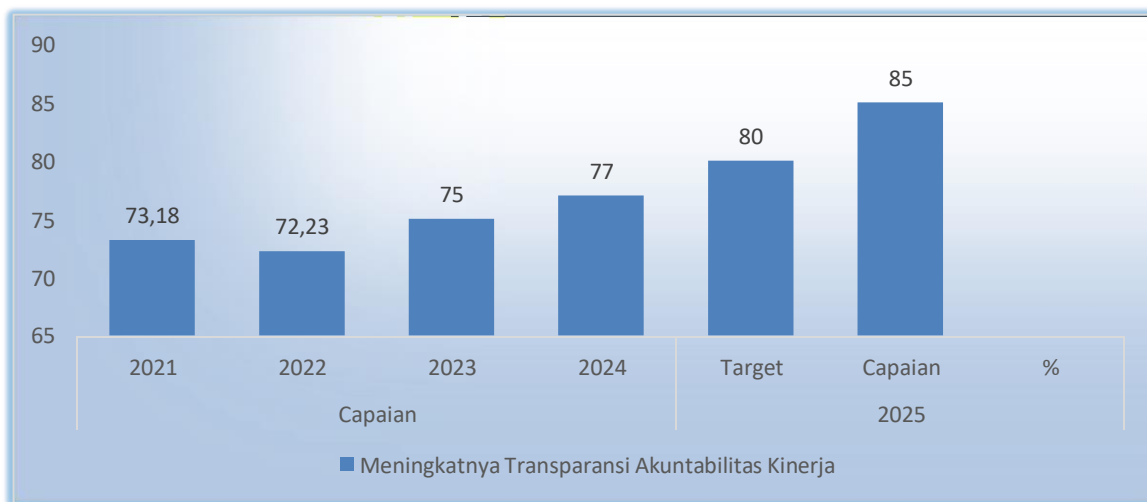




Tabel - 29

Perbandingan Capaian Indikator Sasaran dalam 5 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian			Target		
	2021	2022	2023	2024	2025	%
Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja	72,23	75,6	75,6	85,55	86,70	



Tabel - 30

Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran IV

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		PERSEN TASE
		ALOKASI	REALISASI	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.635.647.219,00	15.190.432.160,00	86,13
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	504.999.999,00	440.889.420,00	87,30
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	255.000.000,00	252.470.720,00	99,01
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,00	20.789.000,00	41,58
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.999.999,00	7.969.500,00	39,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	28.986.000,00	96,62
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	130.674.200,00	87,12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.393.512.084,00	6.540.970.664,00	88,47
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.103.512.084,00	6.275.963.904,00	88,35
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	14.955.000,00	99,70





	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	11.130.000,00	74,20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	250.000.000,00	231.931.760,00	92,77
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	6.990.000,00	69,90
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	328.450.000,00	297.018.000,00	90,43
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	288.450.000,00	258.058.000,00	89,46
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	40.000.000,00	38.960.000,00	97,40
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	532.631.091,00	419.113.460,00	78,69
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	352.410.000,00	292.919.000,00	83,12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.221.091,00	126.194.460,00	70,02
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	648.794.250,00	635.167.281,00	97,90
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218.291.450,00	215.034.550,00	98,51
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000,00	84.526.500,00	99,44
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	43.699.800,00	36.000.900,00	82,38
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.350.000,00	266.673.331,00	99,75
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.453.000,00	32.932.000,00	95,59
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.891.855.909,00	4.891.294.787,00	83,02
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.659.320.000,00	1.954.037.166,00	73,48
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	304.123.000,00	148.705.000,00	48,90
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	900.000.000,00	881.280.621,00	97,92
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.028.412.909,00	1.907.272.000,00	94,03
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.595.032.308,00	1.306.597.108,00	81,92
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	172.075.412,00	86,04
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.345.032.308,00	1.084.571.696,00	80,64
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.371.578,00	659.381.440,00	89,06





	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.860.000,00	273.300.000,00	95,27
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.511.578,00	56.963.102,00	48,89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	337.000.000,00	329.118.338,00	97,66





B. REALISASI ANGGARAN

a. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran

Tabel - 31

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DPPKB Tahun 2023

NO.	RINCIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	TINGKAT EFISIEN
1.	Belanja Operasi	24.597.562.445,00	19.899.111.439,00	80,90	19,1
2.	Belanja Modal	7.432.634.844,00	5.967.798.245,00	80,29	19,71
	Jumlah	32.030.197.289,00	25.866.909.684,00	80,76	19,24

Tabel- 32

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPPKB Tahun 2023

No.	Uraian	Kinerja			Anggaran		Persentase Penyerapan	Tingkat Efisiensi
		Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	85,88	17.635.647.219,00	15.190.432.160,00	86,13	13,87
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	504.999.999,00	440.889.420,00	87,30	12,7
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100	255.000.000,00	252.470.720,00	99,01	0,99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	90	100	50.000.000,00	20.789.000,00	41,58	58,42
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	90	100	19.999.999,00	7.969.500,00	39,85	60,15
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	100	30.000.000,00	28.986.000,00	96,62	3,38
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	80	200	150.000.000,00	130.674.200,00	87,12	12,88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	7.393.512.084,00	6.540.970.664,00	88,47	11,53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	95	95	7.103.512.084,00	6.275.963.904,00	88,35	11,65
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	100	15.000.000,00	14.955.000,00	99,70	0,3

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	95	100	15.000.000,00	11.130.000,00	74,20	25,8
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	98,55	100	250.000.000,00	231.931.760,00	92,77	7,23
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	90	100	10.000.000,00	6.990.000,00	69,90	30,1
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	328.450.000,00	297.018.000,00	90,43	9,57
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	95	100	288.450.000,00	258.058.000,00	89,46	10,54
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100	100	40.000.000,00	38.960.000,00	97,40	2,6
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	532.631.091,00	419.113.460,00	78,69	21,31
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	95	100	352.410.000,00	292.919.000,00	83,12	16,88
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	95	85	180.221.091,00	126.194.460,00	70,02	29,98
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	648.794.250,00	635.167.281,00	97,90	2,1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100	218.291.450,00	215.034.550,00	98,51	1,49
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100	100	85.000.000,00	84.526.500,00	99,44	0,56
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	100	100	100	43.699.800,00	36.000.900,00	82,38	17,62
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100	267.350.000,00	266.673.331,00	99,75	0,25
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	100	100	34.453.000,00	32.932.000,00	95,59	4,41
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	5.891.855.909,00	4.891.294.787,00	83,02	16,90
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	95	90	2.659.320.000,00	1.954.037.166,00	73,48	26,52
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	90	100	304.123.000,00	148.705.000,00	48,90	51,1
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	90	100	900.000.000,00	881.280.621,00	97,92	2,08
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	90	100	2.028.412.909,00	1.907.272.000,00	94,03	5,97

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	1.595.032.308,00	1.306.597.108,00	81,92	18,08
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	95	100	200.000.000,00	172.075.412,00	86,04	13,96
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	95	100	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	0,10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	95	100	1.345.032.308,00	1.084.571.696,00	80,64	19,36
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				740.371.578,00	659.381.440,00	89,06	10,94
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	85	100	286.860.000,00	273.300.000,00	95,27	4,73
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	80	80	116.511.578,00	56.963.102,00	48,89	51,11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	100	98	100	337.000.000,00	329.118.338,00	97,66	2,34
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	80	70	87,5	1.484.609.420,00	1.074.028.066,00	72,34	27,66
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	80	80	100	840.209.500,00	604.959.236,00	72,00	28
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	1	1	100	529.010.000,00	475.833.676,00	89,95	10,05
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	3	4	1,3	50.000.000,00	37.220.000,00	74,44	25,56
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	75	80	85	50.000.000,00	48.120.000,00	96,24	3,76
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	67	70	65	211.199.500,00	43.785.560,00	20,73	79,27

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60	60	100	644.399.920,00	469.068.830,00	72,79	27,21
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	100	100	100	150.000.000,00	118.979.000,00	79,32	20,68
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	100	80	95	74.999.920,00	48.850.830,00	65,13	34,87
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100	100	75	64.200.000,00	3.270.000,00	5,09	94,91
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	100	100	100	75.000.000,00	68.805.000,00	91,74	8,26
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100	90	100	190.200.000,00	139.200.000,00	73,19	26,81
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	90	80	85	90.000.000,00	89.964.000,00	99,56	0,44
3.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	100	100	100	6.570.152.000,00	3.898.072.589,00	59,33	40,67
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	100	100	2.390.330.000,00	905.633.666,00	37,89	62,11
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100	100	100	1.314.580.000,00	268.644.000,00	20,44	79,56
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	98	75	50.000.000,00	21.034.000,00	42,07	56,93
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Mitra Kerja	80	75	35	225.000.000,00	137.663.750,00	61,18	38,82
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	85	80	55	75.000.000,00	25.590.000,00	34,12	65,88
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	90	85	80	247.500.000,00	164.510.000,00	66,47	33,53
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	80	75	45	398.250.000,00	225.666.916,00	56,25	43,75
	Pengendalian Program KKBPK	100	100	100	80.000.000,00	62.525.000,00	78,16	21,84

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100	100	100	847.000.000,00	518.159.800,00	61,18	38,82
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	90	95	90	474.000.000,00	416.362.600,00	87,84	12,16
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	95	90	60	300.000.000,00	46.400.000,00	15,47	84,53
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	100	80	100	73.000.000,00	55.397.200,00	75,89	24,11
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	2.614.822.000,00	1.903.147.123,00	72,78	27,22
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	85	100	36.000.000,00	17.472.000,00	48,53	51,47
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	90	90	90	959.678.000,00	828.674.110,00	86,35	13,65
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100	95	100	434.032.000,00	375.336.000,00	86,48	13,52
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	85	85	75	1.035.112.000,00	539.744.013,00	52,14	47,86
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100	95	100	150.000.000,00	141.921.000,00	94,61	5,39
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	100	100	718.000.000,00	571.132.000,00	79,54	20,46
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	75	75	40	45.000.000,00	15.187.000,00	33,75	66,25

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	90	75	80	84.000.000,00	53.345.000,00	63,51	36,49
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	100	100	95	589.000.000,00	502.600.000,00	85,33	14,67
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				6.339.788.650,00	5.705.598.633,00	90,00	10
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	100	100	5.494.590.000,00	5.101.398.037,00	92,84	7,16
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100	95	100	1.279.400.000,00	1.140.042.305,00	89,11	10,89
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)	95	88	75	680.190.000,00	508.304.287,00	74,73	25,27
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100	100	100	3.135.000.000,00	3.092.284.499,00	98,64	1,36
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100	100	100	250.000.000,00	235.143.000,00	94,06	5,94
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	90	85	75	75.000.000,00	52.245.000,00	69,66	30,34

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keluarga)	90	85	85	75.000.000,00	73.378.946,00	97,84	2,16
	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	90	90	90	<i>845.198.650,00</i>	<i>604.201.095,00</i>	71,49	28,51
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100	100	100	745.198.650,00	516.699.640,00	69,34	30,66
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100	95	83,51	50.000.000,00	39.590.000,00	79,18	20,82
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	90	80	90	50.000.000,00	47.911.455,00	95,82	4,18
					32.030.197.289,00	25.866.909.684,00	80,76	19,24



b. Capaian dan Realisasi Anggaran per Sasaran

Tabel- 33

Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya kesadaran ber-KB Pasangan Usia Subur	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	2,18	2,13	95,46	6.570.152.000,00	3.898.072.589,00	59,33
2.	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	35	44,49	127,11	1.484.609.420,00	1.074.028.066,00	72,34
3.	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	58,50	58,35	99,74	6.339.788.650,00	5.705.599.132,00	90,00
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	85,40	75,60	88,53	17.635.647.219,00	15.190.432.160,00	86,13



Sasaran 1

Meningkatnya Kesadaran ber-KB Pasangan Usia Subur

Sasaran 1 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki indikator berupa persentase Keluarga Berencana aktif per Pasangan Usia Subur (PUS). Pada tahun 2023 target untuk Keluarga Berencana Aktif Per Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 2,18% dengan realisasi sebesar 2,13% atau capaian target sebesar 97,71 %. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 73,80% maka terjadi kenaikan sebesar 1,6% pada tahun 2023 dengan jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 74.505 orang dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 111.358 orang.



Gambar – 2.

Pelayanan KB Dalam Rangka Meningkatkan Angka Kesertaan Ber-KB Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Capaian meningkatnya peserta KB Aktif per Pasangan Usia Subur (PUS) adalah sebagai berikut :

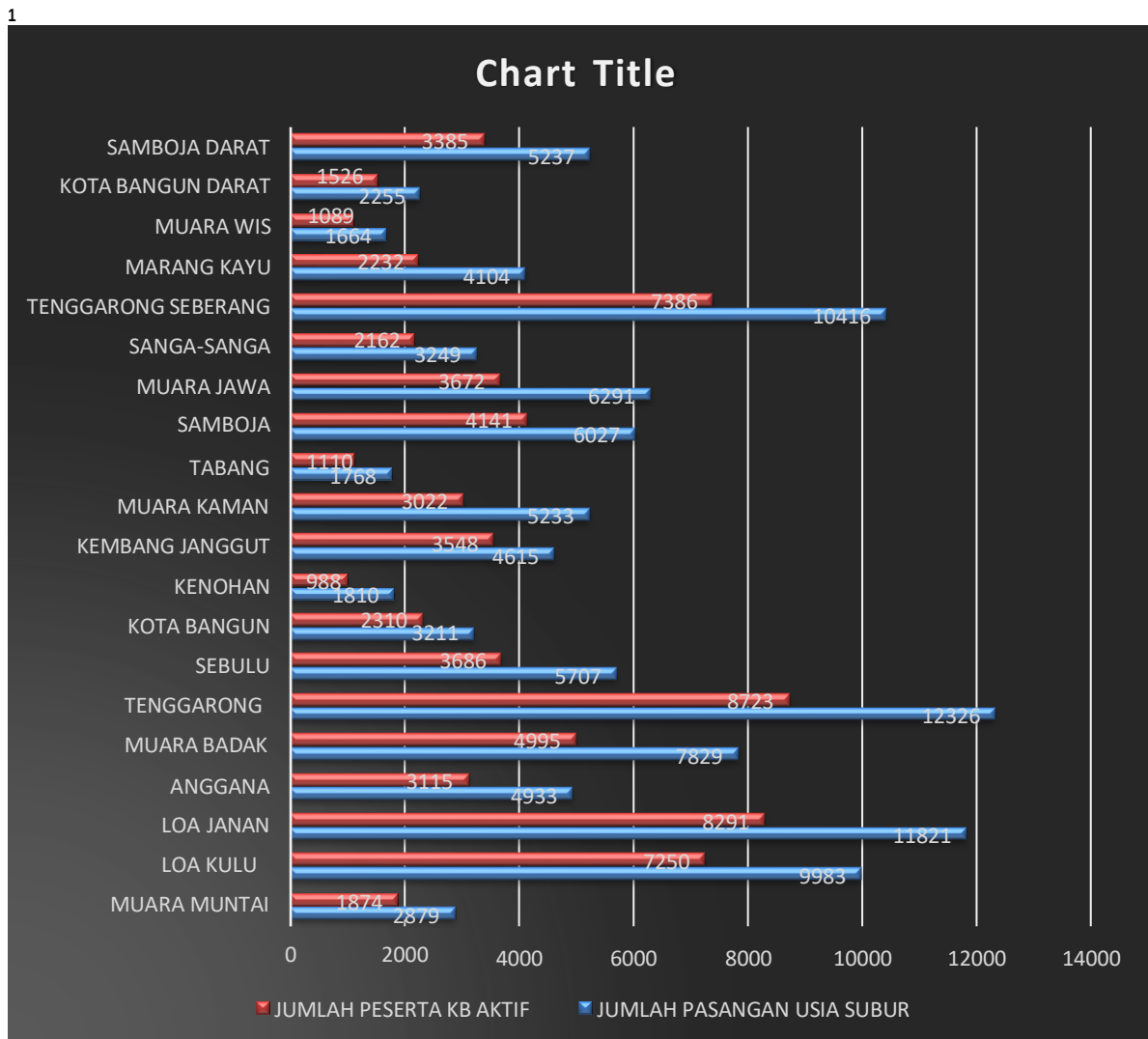
Tabel – 34
Formulir Pengukuran Kinerja
Sasaran 1

Indikator Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PersentaseKeluarga BerencanaAktif Per Pasangan Usia Subur(PUS)	2,24	2,22	2,20	2,39	2,18	2,13	2,16		2,14	



Grafik – 1.
Persentase Keluarga Berencana Aktif
Per Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2019 – 2022

Berdasarkan hasil pendataan terhadap pencapaian peserta KB Aktif di Kabupaten tercatat jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 111.358 dan jumlah real peserta aktif KB sebanyak 74.505. Secara terinci capaian peserta KB aktif untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik – 2.
Jumlah Peserta KB Aktif Di Setiap
Kecamatan Pada Tahun 2023

Sasaran 2. Capaian Peserta KB Aktif

Pasangan Usia Subur (PUS) terbanyak ada di Kecamatan Tenggarong dengan jumlah 12.326 PUS sedangkan untuk PUS yang paling sedikit ada di Kecamatan Muara Wis dengan jumlah 1.664 PUS. Untuk tingkat capaian Peserta KB Aktif tertinggi ada di Kecamatan Tenggarong dengan CPR sebesar 8.723 (11,71%) dan terendah ada di Kecamatan Kenohan dengan CPR sebesar 988 (1,32%).

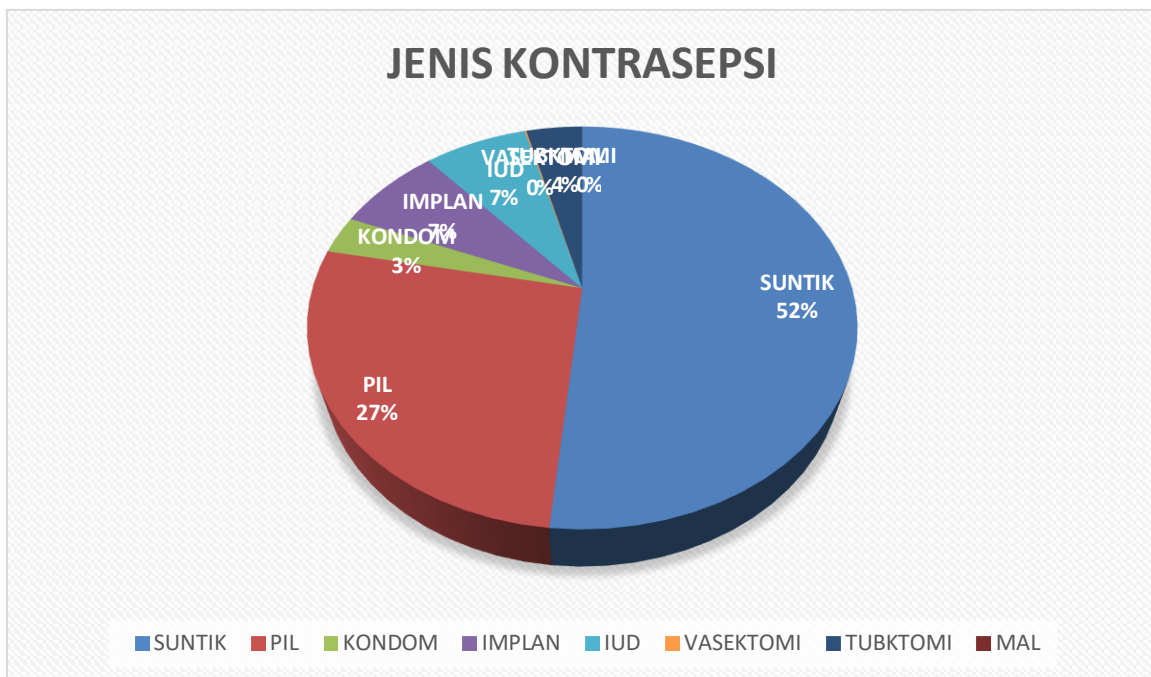
Berdasarkan jenis kontrasepsi yang dibedakan menjadi 2 jenis yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP. Untuk pengguna MKJP di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 tercatat sebanyak 13.840 orang menggunakan metode MKJP terdiri dari 5.385 orang menggunakan IUD, 5.447 orang menggunakan implant dan 2.926 orang menggunakan Metode Operasi Wanita (MOW) serta 82 orang menggunakan Metode Operasi Pria (MOP). Sedangkan untuk Non MKJP sebanyak 60.143 orang dengan rincian sebanyak 38.155 orang menggunakan suntik, pil sebanyak 19.684 orang dan sebanyak 2.304 orang menggunakan kondom. Sehingga jika dilihat dari angka tersebut sampai saat ini kontrasepsi jenis suntik masih banyak diminati oleh akseptor KB di masyarakat, selanjutnya adalah jenis kontrasepsi pil, implant, IUD, Kondom, MOW dan MOP.

Tabel - 27
Rumusan Capaian Peserta KB Aktif

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$

Table- 28
Capaian dan Persentase Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,22	66,91	86,65



Grafik – 3.
Komposisi Jenis Kontrasepsi Yang Digunakan Akseptor
KB Di Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Tahun 2023

Sasaran 3 Meningkatnya akseibilitas keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 dalam program keluarga berencana.

Beberapa upaya terus dilakukan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dalam program Keluarga Berencana diantaranya melalui kegiatan advokasi, komunikasi dan edukasi khususnya yang berada di Kampung KB dimana banyak terdapat keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1. Pelayanan Keluarga Berencana yang lebih mengarah kepada kelompok keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I diharapkan mampu meningkatkan angka peserta Keluarga Berencana dari kelompok ini.



Gambar – 4.
Pelayanan KB Gratis

Adapun permasalahan yang dihadapi di tahun 2023 terhadap pencapaian Sasaran 2 dan Sasaran 3 keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 orang per 2 Desa masih belum terlaksana. Petugas kita sangat kurang di banding dengan letak geografis Kabupaten Kutai Kartanegara dan jumlah desa yang ada. Karena jarak dan akses antar Desa sangat jauh dan sulit dicapai baik dari jalur darat maupun jalur sungai. Sampai saat ini jumlah PLKB dan PKB di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana terinci dibawah ini :

Tabel - 35
Jumlah PLKB dan PKB

Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
PLKB	-	5	5
PKB	10	38	48
Jumlah	10	43	53

Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 237 desa, apabila setiap 2 Desa / Kelurahan minimal memiliki 1 orang PLKB / PKB maka kebutuhan PLKB / PKB di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 119 orang. Jika saat ini jumlah PLKB / PKB yang ada sebanyak 53 orang maka masih terdapat kekurangan tenaga PLKB / PKB sebanyak 66 orang dan untuk mengantisipasi beberapa orang yang akan memasuki purna tugas maka sampai tahun 2023 diperlukan tenaga PLKB / PKB sebanyak 70 orang. Jika dihitung rasio PLKB / PKB yang ada saat ini di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai angka 3,2 dimana 1 orang PLKB / PKB masih menangani sebanyak 3 (Tiga) Desa yang idealnya untuk 1 orang PLKB / PKB hanya menangani 2 (Dua) Desa.

2. Masih minimnya ketersediaan database dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, Sumber Dana, Sarana dan Prasarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data diatas, maka dapat dikatakan berhasil, hal itu dapat diukur dari seluruh target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan katagori Baik. Hal tersebut didukung data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) rata-rata capaiannya sebesar 79,79 % dengan rincian sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesertaan ber KB sebesar 102,35 %
 2. Meningkatnya Indek pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebesar 108,27%
 3. Meningkatnya Cakupan Stake holder yang terlibat dalam BANGGA KENCANA yaitu sebesar 20,00%
 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 88,53%
- Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana dan dukungan dari mitra kerja.

Permasalahan yang masih ada :

1. Masih tingginya angka stunting, yang salah satunya karena kurang aktifnya kader Tribina.
2. Kurang optimalnya kader UPPKA untuk aktif mendorong kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi produktif.

4.2 Rekomendasi

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 4.2.1 Meningkatkan advokasi KIE-KB sebagai upaya mendorong kesertaan ber KB
- 4.2.2 Meningkatkan kualitas Tribina (BKB, BKR, BKL) untuk mendorong pengurangan angka stunting
- 4.2.3 Meningkatkan kapasitas kader UPPKS sebagai upaya mendorong ekonomi keluarga.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Evaluasi SAKIP DPPKB

NO	KOMPONEN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
		Bobot (%)	Nilai	Bobot (%)	Nilai	
1	Perencanaan Kinerja	30	24,67	30	22,20	(2,47)
2	Pengukuran Kinerja	25	17,50	30	22,50	5,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,04	15	12,15	0,11
4	Evaluasi Internal	10	4,24	25	18,75	14,51
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	13,78	-	-	-
	Total	100	72,23	100	75,60	3,37
	Predikat		BB		BB	
	Interprestasi		Sangat Baik		Sangat Baik	

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja DPPKB Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. ADINUR, M.A.P.
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
16. Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

Drs. ADINUR, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196502101990031016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,25
2	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program KKBPK	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	Persen	35
3	Menurunnya angka kelahiran total / Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49) tahun	Menurunnya Angka TFR per WUS (15-49) tahun	Persen	2,18
4	Meningkatnya pemberdayaan keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	Nilai	58,50
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Persen	100
6	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
7	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100

8	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
9	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
10	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
11	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
12	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
13	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
14	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2

15	Melaksanakan revaluasi awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Revaluasi Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
16	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
17	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
18	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5
19	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.475.260.000,00	APBD/DAK
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.403.409.920,00	APBD/DAK
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.059.888.650,00	APBD/DAK

4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.724.150.922,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		23.662.709.492,00	

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

Drs. ADINUR, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196502101990031016


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MASTUKHAH, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ADINUR, M.AP**
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 01 Februari 2023

Pihak Kedua, KEPALA DINAS  Drs. ADINUR, M.AP Pemjua Utama Muda NIP. 19650210 199003 1 016	Pihak Pertama, SEKRETARIS  Drs. MASTUKHAH, M. Si Pemjua Tk.1 NIP. 19671112 199203 2 007
--	--


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI LINDAWATI, S.Sos, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ADINUR, M.AP**
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUKUL FITRINGSIH, S.KM, MPH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ADINUR, M.AP**
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. BERTHA MELANIA, SE., M.Si**
Jabatan : **KASUBBAG UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. MASTUKHAH, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JULIANITA, S. Kep.**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YUSIANA, SE., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENNIE ASFIYANIE, SE., M.Si**
Jabatan : **PERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. MASTUKHAH, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURYANI, S. Sos.**
Jabatan : **PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SRI LINDAWATI, S.Sos, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir.Hj.YOVIA MOUSVITA**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ADINUR, M.AP**
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HAIDIR, SE.,MM**
Jabatan : **PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. Hj. YOVIA MOUSVITA**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

Lampiran 3. Publikasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

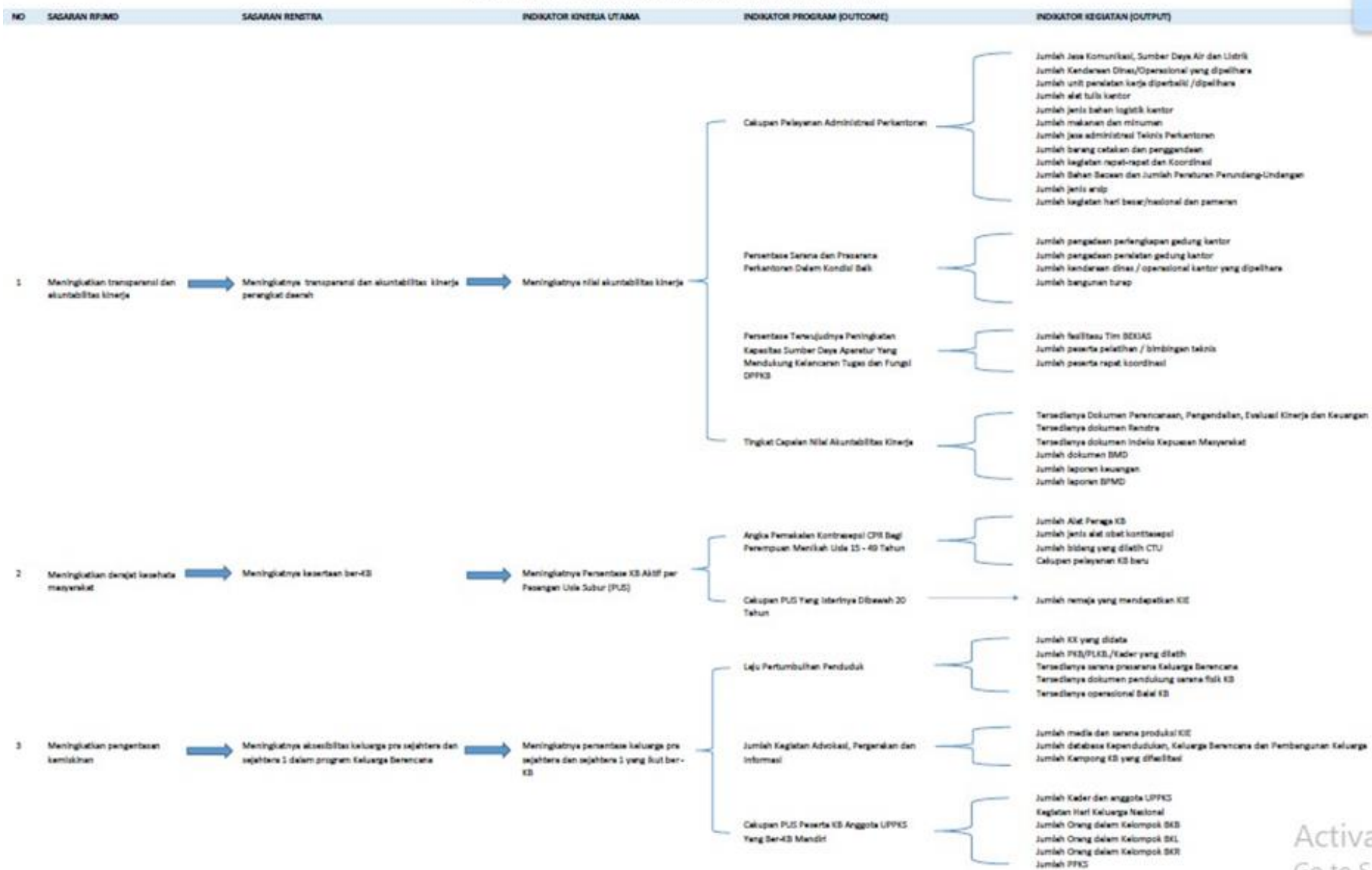


Lampiran 4. Sasaran Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023			KATEGORI
			TARGET	CAPAIAN	PRESENTASE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya AngkaKelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	2,18	2,13	102,35	Baik Sekali
2	Meningkatnya peran Stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan Stakeholder yang terlibat dalam Program Bangga Kencana	35	7	20,00	Kurang Sekali
3	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	58,50	63,34	108,27	Baik Sekali
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	85,40	75,60	88,84	Baik

Lampiran 5. Pohon Kinerja Tahun 2023

POHON KINERJA / CASCADING PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Lampiran 6. Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

RENCANA KINERJA

CAPAIAN STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2023

SASARAN	RENCANA AKSI											
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
								I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah												
	Porgram Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP DPPKB	85,40		17.635.647.219,00					
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah					504.999.999,00					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53 Dokumen		255.000.000,00	X	X	X	X	Kadis/SEKRETA RIS
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen		50.000.000,00	X		X	X	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/DPA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	12 Laporan		19.999.999,00		X	X		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	54 Dokumen		30.000.000,00	X	X	X	X	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen		150.000.000,00	X	X	X	X	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.393.512.084,00					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	770 Orang / bulan		7.103.512.084,00	X	X	X	X	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	150 Dokumen		15.000.000,00	X	X	X	X	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		15.000.000,00	X	X	X	X	
			Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	19 Laporan		250.000.000,00	X	X	X	XX	

Lampiran 6. Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

			Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan								
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan		10.000.000,00	X	X	X	X	
		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>					328.450.000,00					
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		288.450.000,00	X	X	X	X	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		40.000.000,00	X	X	X	X	
		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					532.631.091,00					
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket	120 Paket		352.410.000,00	X	X	X	X	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai	16 Orang		180.221.091,00	X	X	X	X	
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					648.794.250,00					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	25 Paket		218.291.450,00	X	X	X	X	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	2 Paket		85.000.000,00	X	X	X	X	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Lembar Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26862 Lembar		43.699.800,00	X	X	X	X	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	90 Laporan		267.350.000,00	X	X	X	X	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	500 Dokumen		34.453.000,00	X	X	X	X	
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	440 Dokumen		5.891.855.909,00					
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Lapangan yang disediakan			2.659.320.000,00				X	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan Mesin lainnya	60 Unit		304.123.000,00				X	
			Pengadaan Sarana dan	Jumlah Unit perlengkapan	266 Unit		900.000.000,00				X	

Lampiran 6. Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana prasarana gedung kantor								
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	60 Unit		2.028.412.909,00				X	
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			4 Unit		1.595.032.308,00					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan/waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		200.000.000,00	x	x	x	x	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan/waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	66 Laporan		50.000.000,00		x	x		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan/Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	12 Laporan		1.345.032.308,00	x	x	x	x	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					740.371.578,00					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak	11 Unit		286.860.000,00	x	x	x	x	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak	128 Unit		116.511.578,00	x	x	x	x	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit		337.000.000,00	x	x	x	x	
Meningkatnya peran Stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			Cakupan Stakholder yang terlibat dalam Program KKBPK	35 Persen		1.484.609.420,00					Kabid/PPTK
		<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>		Tersedianya Data Keluarga	1092 Dokumen		840.209.500,00					
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan	1 Dok		529.010.000,00	x	x	x	x	

Lampiran 6. Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

			Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Pembangunan								
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Jalur Formal	6 Dokumen		50.000.000,00	x	x	x	x	
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan	250 Dokumen		50.000.000,00	x	x	x	x	
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program KKBPK	13 Laporan		211.199.500,00	x	x	x	x	
		<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>		Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Di Kabupaten Kutai Kartanegara	75 Persen		644.399.920,00					
			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen		150.000.000,00	x	x	x	x	
			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen		74.999.920,00	x	x	x	x	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan		64.200.000,00	x	x	x	x	
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	18 Dokumen		75.000.000,00	x	x	x	x	
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	237 Laporan		190.200.000,00	x	x	x	x	
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data	17 Dokumen		90.000.000,00	x	x	x	x	
Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Persen		6.570.152.000,00					Kabid/PPTK
		<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>		Terlaksananya Kegiatan Advokasi dan KIE	5 Even		2.390.330.000,00					
			Advokasi Program KKBPK	Jumlah Organisasi yang di	11 Organisasi		1.314.580.000,00	x	x	x	x	

Lampiran 6. Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

			kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi								
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Kegiatan KIE	2 Dokumen		50.000.000,00	x	x	x	x	
			x	x	x	x	225.000.000,00	x	x	x	x	
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah dan jenis media	3 Media		75.000.000,00					
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Dokumen Laporan	180 laporan		247.500.000,00	x	x	x	x	
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Dokumen Laporan	18 laporan		398.250.000,00	x	x	x	x	
			Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Kegiatan Operasional KB di Lapangan	237 Desa		80.000.000,00	x	x	x	x	
		<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>					847.000.000,00					
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Organisasi Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pembinaan Kader IMP	1500 Organisasi		474.000.000,00	x	x	x	x	
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Dokumen Laporan	69 Dokumen		300.000.000,00	x	x	x	x	
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Kader IMP	237 Orang		73.000.000,00	x	x	x	x	
		<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>		Tersedianya alat obat dan kontrasepsi pada fasilitas kesehatan	40 Lokasi		2.614.822.000,00	x	x	x	x	
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan	40 laporan		36.000.000,00	x	x	x	x	

Lampiran 6. Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

			Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS	2.203 Orang		959.678.000,00	x	x	x	x	
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dan Jenis Sarana Penunjang (Balai KB, Komputer)	33 Unit		434.032.000,00	x	x	x	x	
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Tenaga Kesehatan yang Dibina	28 Laporan		1.035.112.000,00	x	x	x	x	
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Akseptor yang dilayani	18 Organisasi		150.000.000,00	x	x	x	x	
		<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>					718.000.000,00					
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Ormas dan Mitra Kerja	38 Organisasi		45.000.000,00	x	x	x	x	
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Kampung KB Bernilai Baik	40 Dokumen		84.000.000,00	x	x	x	x	
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB	38 Kampung		589.000.000,00	x	x	x	x	
Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Cakupan Anggota Bina Keluarga Ber-KB	67,25 Persen		6.339.788.650,00	x	x	x	x	Kabid/PPTK
		<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		Terlaksananya Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	36 Persen		5.494.590.000,00	x	x	x	x	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Umit peyediaan sarana kelompok	54 Unit		1.279.400.000,00	x	x	x	x	

Lampiran 6. Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

			Keluarga/UPPKS)									
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/KaderKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPPKS ,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Kader yang mengikuti orientasi Pendamping Keluarga TPK	3,144 orang		680.190.000,00	x	x	x	x	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	14.310 Orang		3.135.000.000,00	x	x	x	x	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	60 Kelompok		250.000.000,00	x	x	x	x	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi sosialisasi	150 Laporan		75.000.000,00	x	x	x	x	
			x	x	x	x	75.000.000,00	x	x	x	x	
		<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		Terlaksananya dan Terpenuhinya Peran Serta ORMAS dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	60 Persen		845.198.650,00					
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan	50 Laporan		745.198.650,00	x	x	x	x	
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam PengelolaanProgram Ketahanan dan	Jumlah Organisasi	120 Orang		50.000.000,00	x	x	x	x	

Lampiran 6. Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

			Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan	50 Laporan		50.000.000,00	x	x	x	x	

Kepala,



Drs. Adinur, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 04 Kode Pos 75512
T E N G G A R O N G

Nomor : P. 23/DPPKB/Keu/800.1.5/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Kunci
IKK Outcome dan Output LPPD Tahun 2023

Tenggarong, 10 Januari 2024
Kepada
Yth, Bupati Kutai Kartanegara
di-
Tenggarong

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome

No	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian
1	2.m.1	IKK Outcome TFR (Total Fertility Rate) Angka Kelahiran Total	2.13

Perhitungan

$$TFR = \sum_{i=1}^5 ASFR_i (i = 1, 2, 3, \dots)$$

TFR : 2.13

5 .- Per 1,000

TFR : 2.13 .- tiap wanita usia 15 - 49 tahun

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Output

No	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian
1	2.m.1	IKK Outcome TFR (Total Fertility Rate) Angka Kelahiran Total		
	2.m1.1		1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada
	2.m1.2		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	98.74 %
	2.m1.3		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	21 Kelahiran
	2.m1.4		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	67.22 %
	2.m1.5		5. Jumlah takeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	31 MOU



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Drs. ADRIUS, MAP
Pemimpin Utama Muda (PUM)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 04 Kode Pos 75512
TENGGARONG

Nomer : P. 23 /DPPKB/Keu/800.1.5/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Kunci IKK Outcome dan Output LPPD Tahun 2023

Tenggarong, 10 Januari 2024
Kepada
Yth, Bupati Kutai Kartanegara
di-
Tenggarong

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome

No	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian
3	2.m.3	IKK Outcome Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12.80

Perhitungan

$$\begin{aligned} & \frac{2.m.3 \text{ Jumlah PUS yang Ingin Ber KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\% \\ &= \frac{14,238}{111,358} \times 100\% \\ &= 12.80 \end{aligned}$$

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome & Output

No	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian
3	2.m.3	IKK Outcome Persentase Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		
	2.m.3.1		1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0.
	2.m.3.2		2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	23,91 %



Downloaded from: <https://www.kutai.kartanegara.go.id>
KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Drs. AGUS RIAP



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 04 Kode Pos 75512
TENG GARONG

Nomer : P.23/DPPKB/Keu/800.1.5/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Kunci
IKK Outcome dan Output LPPD Tahun 2023

Tenggarong, 10 Januari 2024
Kepada
Yth, Bupati Kutai Kartanegara
di-
Tenggarong

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome

No	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian
2	2.m.2	IKK Outcome Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66.91

Perhitungan

$$\begin{aligned} & \frac{2.m.2}{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Modern}} \times 100 \\ & \frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100 \\ & = \frac{74,505}{111.358} \times 100 \\ & = 66,91 \end{aligned}$$

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome & Output

No	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian
2	2.m.2	IKK Outcome Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		
	2.m.2.1		1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	93,02 %
	2.m.2.2		2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	66,91%
	2.m.2.3		3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	40 SK
	2.m.2.4		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	122.06 %



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KINERJA Sasaran dan Program Renstra Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Tahun 2023



Sasaran/Program	Indikator	2022			2023			Ket
		Target	Realisasi	%	Target	Perkiraan Capaian	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,10	72,23	84,88	85	85	100	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Stakholder yang Terlibat dalam Program KKBPK	30	30	100	35	35	100	Jumlah PKS/Jumlah Mitra Kerja x 100
	Penyediaan Data Keluarga				100	100	100	Jumlah data Keluarga yang dimutakhirkan KKBPK / Jumlah Seluruh Keluarga Yang didata 19.678 / 27.255

Perentase Capaian IKU Cakupan Stakeholder yang terlibat Dalam Program BANGGA KENCANA DALDUK

JULMAH PKS	JUMLAH MITRA KERJA	PRESENTASE
A	B	A : B X C
(REALISASI)	(TARGET)	X 100
7	35	20,00%